



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
Dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah                                    | Rp | 2.404.142.925.300,75 |
| b. Belanja Daerah                                       | Rp | 2.441.875.395.917,78 |
| Defisit   | Rp | (37.732.470.617,03)  |
| c. Pembiayaan Daerah                                    |    |                      |
| 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah                         | Rp | 119.315.829.032,84   |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah                        | Rp | 9.000.000.000,00     |
| Pembiayaan Neto   | Rp | 110.315.829.032,84   |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | Rp | 72.583.358.415,81    |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

|    |  |    |                           |
|----|--|----|---------------------------|
| a. | Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp 31.710,095.569,25 dengan rincian sebagai berikut:       |    |                           |
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan   | Rp | 2.435.853.020.870,00      |
| 2. | Realisasi Pendapatan   | Rp | 2.404.142.925.300,75      |
|    | Selisih Kurang   | Rp | <u>31.710,095.569,25</u>  |
| b. | Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp 104.293.453.985,22 dengan rincian sebagai berikut:         |    |                           |
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan   | Rp | 2.546.168.849.903,00      |
| 2. | Realisasi Belanja  | Rp | 2.441.875.395.917,78      |
|    | Selisih Kurang   | Rp | <u>104.293.453.985,22</u> |
| c. | Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 72.583.358.415,97 dengan rincian sebagai berikut:  |    |                           |
| 1. | Defisit Anggaran Setelah Perubahan   | Rp | (110.315.829.033,00)      |
| 2. | Realisasi  | Rp | (37.732.470.617,03)       |
|    | Selisih Lebih  | Rp | <u>72.583.358.415,97</u>  |
| d. | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,16 dengan rincian sebagai berikut:         |    |                           |
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan   | Rp | 119.315.829.033,00        |
| 2. | Realisasi  | Rp | 119.315.829.032,84        |
|    | Selisih Kurang   | Rp | <u>0,16</u>               |
| e. | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut: |    |                           |
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan   | Rp | 9.000.000.000,00          |
| 2. | Realisasi  | Rp | 9.000.000.000,00          |
|    | Selisih Kurang/Lebih   | Rp | <u>-</u>                  |
| f. | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,16 dengan rincian sebagai berikut:              |    |                           |
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan   | Rp | 110.315.829.033,00        |
| 2. | Realisasi  | Rp | 110.315.829.032,84        |
|    | Selisih Kurang   | Rp | <u>0,16</u>               |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

|    |   |    |                          |
|----|---|----|--------------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp | 119.315.829.032,84       |
| b. | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 119.315.829.032,84       |
|    | Jumlah  | Rp | <u>-</u>                 |
| c. | Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)      | Rp | 72.583.358.415,81        |
|    | Jumlah  | Rp | <u>72.583.358.415,81</u> |

|   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | -                        |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir                   | Rp | <u>72.583.358.415,81</u> |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

|                                 |    |                             |
|---------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Aset                         |    |                             |
| 1. Aset Lancar                  | Rp | 120.681.892.604,07          |
| 2. Investasi Non Permanen       | Rp | -                           |
| 3. Investasi Permanen           | Rp | 144.889.806.860,38          |
| 4. Aset Tetap                   | Rp | 3.802.157.028.249,02        |
| 5. Dana Cadangan                | Rp | -                           |
| 6. Aset Lainnya                 | Rp | <u>121.209.635.732,19</u>   |
| Jumlah Aset                     | Rp | <u>4.188.938.363.445,65</u> |
| b. Kewajiban                    |    |                             |
| 1. Kewajiban Jangka Pendek      | Rp | 10.673.243.549,41           |
| 2. Kewajiban Jangka Panjang     | Rp | -                           |
| Jumlah Kewajiban                | Rp | <u>10.673.243.549,41</u>    |
| c. Ekuitas                      |    |                             |
| Jumlah Ekuitas                  | Rp | <u>4.178.265.119.896,25</u> |
| d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | Rp | <u>4.188.938.363.445,65</u> |

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

|   |    |                             |
|---|----|-----------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                        | Rp | 2.210.880.362.314,52        |
| b. Beban Daerah                             | Rp | <u>2.193.617.975.787,89</u> |
| c. Surplus dari Kegiatan Operasional        | Rp | 17.262.386.526,63           |
| d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional    | Rp | <u>(7.420.761.967,91)</u>   |
| e. Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa | Rp | <u>9.841.624.558,71</u>     |
| f. Pos Luar Biasa                           | Rp | -                           |
| g. Surplus Laporan Operasional              | Rp | <u>9.841.624.558,71</u>     |

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi                          |     |                      |
| 1. Arus Masuk Kas   | Rp  | 2.403.662.101.525,75 |
| 2. Arus Keluar Kas  | Rp  | 2.109.128.491.566,20 |
| 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                   | Rp  | 294.533.609.959,55   |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi                        |     |                      |
| 1. Arus Masuk Kas   | Rp  | 480.823.775,00       |
| 2. Arus Keluar Kas  | Rp  | 341.746.904.351,58   |
| 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi                 | Rp  | (341.266.080.576,58) |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan            |     |                      |
| 1. Arus Masuk Kas   | Rp  | -                    |
| 2. Arus Keluar Kas  | Rp  | -                    |
| 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan     | Rp  | -                    |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran         |     |                      |
| 1. Arus Kas Masuk   | Rp  | 135.029.660.386,56   |
| 2. Arus Kas Keluar  | Rp  | 135.102.222.735,56   |
| 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran | Rp  | (72.562.349,00)      |
| e. Kenaikan/ (Penurunan) Kas                                | Rp  | (46.805.032.966,03)  |
| f. Saldo Awal Kas di BUD                                    |     |                      |
| 1. Saldo Awal Kas di BUD                                    | Rp  | 75.380.732.364,87    |
| 2. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD dr Soeroto                   | Rp  | 39.743.819.728,64    |
| 3. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng                       | Rp  | -                    |
| 4. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan                    | Rp  | -                    |
| 5. Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas                         | Rp  | 3.987.782.422,32     |
| 6. Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)                       | Rp  | -                    |
| 7. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan                   | Rp  | 42.516.160,00        |
| 8. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD              | Rp  | -                    |
| 9. Saldo Awal di Bendahara BOS                              | Rp  | 157.392.794,33       |
| 10. Saldo Awal di Bendahara Pengeluaran                     | Rp  | 2.380.500,00         |
| 11. Saldo Awal Kas Lainnya                                  | Rp  | 72.562.349,00        |
| 12. Saldo Awal Kas Lainnya PFK                              | Rp  | 1.205.062,68         |
| Jumlah Saldo Awal Kas                                       | Rp. | 119.388.391.381,84   |
| g. Saldo Akhir Kas  |     |                      |
| 1. Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah                      | Rp  | 48.205.069.691,54    |
| 2. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr Soeroto                  | Rp  | 18.124.579.588,03    |



|     |  |    |                          |
|-----|--|----|--------------------------|
| 3.  | Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng           | Rp | 467.527.288,14           |
| 4.  | Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan        | Rp | 575.134.553,94           |
| 5.  | Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas            | Rp | 3.562.647.464,82         |
| 6.  | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan      | Rp | 125.066.932,00           |
| 7.  | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD | Rp | -                        |
| 8.  | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran     | Rp | -                        |
| 9.  | Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS             | Rp | 143.969.158,33           |
| 10. | Saldo Akhir Kas Lainnya                      | Rp | 1.379.363.749,00         |
| 11. | Saldo Awal Kas PFK                           | Rp | -                        |
|     | Jumlah Saldo Akhir Kas                       | Rp | <u>72.583.358.415,80</u> |

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

|    |  |    |                             |
|----|--|----|-----------------------------|
| a. | Ekuitas Awal   | Rp | 4.177.693.717.272,04        |
| b. | Surplus ( Defisit) LO                                      | Rp | 9.841.624.558,71            |
| c. | RK PPKD  | Rp | -                           |
| d. | Koreksi Atas Ekuitas Awal                                  | Rp | (9.270.221.934,51)          |
| e. | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan | Rp | -                           |
| f. | Ekuitas Akhir  | Rp | <u>4.178.265.119.896,25</u> |

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
  2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- 
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO)
  - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - e. Lampiran V : Neraca
  - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK)
  - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)
  - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
  - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
  - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
  - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
  - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
  - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
  - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
  - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
  - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
  - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
  - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
  - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
  - u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
  - v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 23 Juli 2024



Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(101-3/2024)